

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI DAMPAK DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SANITASI  
LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT**

**(Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi  
Kabupaten Kepulauan Meranti)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau**



**REKA YULIANA**

**157310119**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2019**

**Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)**

**ABSTRAK**

**Reka Yuliana**

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Dana Alokasi Khusus, Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat.

Persoalan sanitasi di Kabupaten Kepulauan Meranti relatif masih tertinggal masih banyak penduduk yang belum mendapatkan akses sanitasi layak. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum membuat suatu Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang bertujuan sebagai solusi penyediaan sarana prasarana sanitasi untuk masyarakat yang lingkungan permukimanya padat, kumuh dan berpenghasilan rendah. Kegiatan ini didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanannya mengacu pada (Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi) dan (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat). Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu penerima program tersebut. Kegiatan dilakukan secara swakelola yang berbasis masyarakat mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan dan melihat dampak yang timbul dan perubahan kondisi sanitasi terhadap soisal dan lingkungan masyarakat. Penelitian menggunakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dan sampel penelitian yaitu Kepala Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Meranti, Lurah Selatpanjang Selatan, Tenaga Fasilitator Lapangan, RT, RW, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Kampung Baru. Dan masyarakat kelompok penerima pemanfaat kegiatan yang merupakan responden yang mengetahui masalah. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Tahun 2017 di Kelurahan Selatpanjang Selatan telah terlaksana dengan cukup baik. Kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur sanitasi memberikan dampak perubahan pada lingkungan serta memberikan manfaat postif bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat. Kesuksesan kegiatan juga dilihat dari keterlibatan masyarakat untuk saling berpartisipasi dan tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

IMPACT EVALUATION SPECIAL ALLOCATION FUNDS COMMUNITY-  
BASED ENVIRONMENTAL SANITATION  
(Study Selatpanjang Selatan Village Tebing Tinggi District Meranti Island  
Regency)

ABSTRACT

Reka Yuliana

Keywords : Policy Evaluation, Special Allocation Funds, Community-Based  
Environmental Sanitation.

Sanitation issues in Regency of Meranti Island are still relatively underdevelop proper access. The Central Government through it Miniatry of Public Works created a Community-Based Environmental Sanitation Program that provieds solutions for providing infrastructure to people whose dwellings are dense, slums and low-income. This activity is funded through the Special Allocations Fund (DAK). The implementation support ( Guideliens for the Use of the Sanitations Sub-Sector Infarstructure) and ( Technical Guidelines for the Implementations of Community-Based Special Sanitation Funds for Allocation). Selatpanjang Village Tebing Tinggi District Meranti Island Regency is one of the recipients of the program. Activites carried out by community-based slf-management start from preparation, planning, implemantation and maintenance. The study aims tu discuss the activities and see the impacts and changes is sanitation conditions of the community's environment and problems. Research using quantitaive by using descriptive. The population and sample of the study were the Head of Sanitation Department of Pubic Works and Spatial Planning, Housing and Settlement Areas, District of Meranti island, South Selatpanjang Village, Field Facilitator Power, RT, RW, Chairperson of the Kampung Baru Community Self-Help Group. And the community receives beneficiaries of activities that are respondents who know the problem.based on the results of this study regarding the activites of the Special Allocation Fund for the Field of Environmental Sanitation in 2017 in Selatpanjang Selatan Village has been carried out quitq well. Infrastructure infrastructure development activites provide assistance to change the environment and provide positive benefits for the healty and envrionment of the community. The success of the activites can also be see from the partipation of the community to support each other and cut the independence of the community in the change to behave in clean and healty life.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur *allhamdulillah* kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, walaupun masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan didalam karya ilmiah ini.

Shalawat berserta salam penulis ucapakan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang sepenuh hati dan jiwa untuk menyampaikan risalah al-Qur'an bagi semua umat manusia, dan telah berjuang untuk merubah akhlak manusia.

Skripsi yang berjudul “ Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)” ini penulis tulis dan diajukan ke Faklutas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Kemudian dalam penulisan Skripsi ini juga, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis dalam menghadapi tantangan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Aidi Yogia, M.si selaku Dekan Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan jajaran Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan semangat membantu penulis dalam menyusun Skripsi ini.
5. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak Andriyus, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan membagi pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
8. Ucapan Terimakasih secara khusus untuk kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Syaiful Ahmadi dan Ibunda Misyati yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dan membantu dalam segi materil dan moril maupun doa-doanya sehingga penulis dapat kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih yang tak terhingga kepada adik ku Eva Nuruldianti, serta sepupuku Hesty Fitirana Hastuti dan Febri Saputra A.md yang selalu

memberikan motivasi dan dukungannya selama penulis melaksanakan studi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Terimakasih teman-teman seperjuangan yang telah membantu Risi Rahmawati, Istiana , Arliis , Bella Hermayunita serta rekan-rekan seperjuangan keluarga besar IP.D angkatan 2015 yang sama-sama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penulis bermohon kepada Allah SWT semoga jasa baik yang diberikan oleh berbagai pihak itu dibalas dengan balasan alam kebaikan disisi Allah SWT, amin ya robbal alamin..

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 23 Oktober 2019

Penulis

Reka Yuliana

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	19
1. Konsep Pemerintahan .....	19
2. Konsep Kebijakan Publik.....	22
3. Konsep Implementasi kebijakan .....	24
4. Konsep Evaluasi Kebijakan.....	25
a. Pengertian Evaluasi Kebijakan .....	25
b. Tujuan Evaluasi Kebijakan .....	25
c. Langkah-langkah Evaluasi Kebijakan .....	26
d. Pendekatan Evaluasi Kebijakan.....	26
e. Model Evaluasi Kebijakan .....	28
f. Kreteria Evaluasi .....	29
g. Metode Evaluasi .....	31
h. Evaluasi Dampak .....	32
5. Konsep Sanitai Lingkungan.....	35

B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka pikir.....	38
D. Konsep Oprasional .....	39
E. Operasinoalisai variabel .....	41
F. Teknik Pengukuran .....	43

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Populasi dan Sampel .....	46
D. Teknik Penarikan Sampel .....	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data .....	50
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	51

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Kabupaten Kepulauan Meranti .....	52
B. Kecamatan Tebing Tinggi .....	52
C. Sejarah terbentuknya Kelurahan Selatpanjang Selatan .....	53
D. Keadaan Geografis .....	54
E. Keadaan Penduduk .....	54
F. Pendidikan Penduduk .....	55
G. Mata Pencaraian Penduduk .....	55
H. Pemerintahan Kelurahan Selatpanjang Selatan .....	56
I. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Kepualuan Meranti .....	58

### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Indentitas Responden .....	61
B. Hasil Penelitaian dan Pembahasan .....	63

### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84





Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 : Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Kegiatan Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK (melayani 25 SR) Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	13
II.1 : Penelitian Terdahulu .....	36
II.2 :Oprasional Variabel Tentang Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi kasus dikelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti) .....	39
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel .....	46
III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi kasus dikelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti).....	51
IV.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	54
IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan .....	55
IV.3 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan .....	56
IV.4 : Jumlah Pemerintahan Kelurahan Selatpanjang Selatan.....	56
V.1 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan .....	61
V.2 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Umur.....	62
V.3 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	63
V.4 : Tanggapan Responden Penelitian Mengenai Input .....	65
V.5 : Tanggapan Responden Penelitian Mengenai Proses .....	69
V.6 : Tanggapan Responden Penelitian Mengenai Output.....	72
V.7 : Tanggapan Responden Penelitian Mengenai Outcome .....	76
V.8 :Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi	

kasus dikelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi  
Kepulauan Meranti) ..... 79



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 :Kerangka Pikir Tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).....	38
II.1 :Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Selatpanjang Selatan ..	57



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tujuan Negara sebagaimana termaksud dalam pembukaan undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara tersebut, disusunlah pemerintah dalam bentuk susunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi tugas urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, dimana kepada daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan pedoman peraturan perundang-undangan. Melalui desentralisasi diharapkan kemampuan pemerintah daerah memanejemenkan pembangunan secara akurat dan tepat. Urusan pemerintahan yang diserahkan atau

didistribusikan kepada daerah tersebut disertai pula dengan penyerahan atau transfer keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehubungan dengan adanya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan atau ditransfer kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Mekanisme hubungan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

- 1) Sumber pendapatan asli Daerah meliputi :
  - a. Pendapatan asli Daerah meliputi :
    1. Pajak daerah;

2. Retribusi daerah;
  3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- 2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Transfer Pemerintahan Pusat terdiri atas :
    - 1. Dana perimbangan;**
    2. Dana otonomi khusus;
    3. Dana keistimewaan; dan
    4. Dana desa.
  - b. Transfer antar-Daerah terdiri atas :
    1. Pendapatan bagi hasil; dan
    2. Bantuan keuangan.

Transfer Pemerintah Pusat salah satunya Dana Perimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 288 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dana perimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1) terbagi atas :

- a. Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dari 3 (Tiga) mekanisme transfer keuangan pusat ke daerah salah satunya Dana Alokasi Khusus dalam Pasal 292 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa DAK :

1. Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf c bersumber dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Kebijakan Dana Alokasi Khusus dibahas dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penetapan rencana kerja Pemerintah Pusat.
3. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan.
4. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional mengkoordinasikan usulan kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dengan Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam rencana Kerja Pemerintah Pusat sebagai kegiatan khusus yang akan didanai DAK.
5. Kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pengalokasian Dana Alokasi Khusus.



Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional. Tujuan Dana Alokasi Khusus juga di atur dalam Peraturan Pemerintahan No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan yaitu untuk membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, menyatakan pada Pasal 1 Ayat (1) Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Serta pada Pasal 2 Ayat (1) Dana Alokasi Khusus memiliki ruang lingkup atau subbidang DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi :

- a) DAK Fisik Reguler;
- a) DAK Fisik Penugasan; dan
- b) DAK Fisik Afirmasi.

Dari 3 jenis bidang yang diatas DAK Fisik Reguler sebagaimana pada Ayat

(1) huruf a meliputi bidang:

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Perumahan dan pemukiman;
- d) Pertanian;
- e) Kelautan dan perikanan;
- f) Sentra industri kecil dan menengah;

g) Pariwisata;

DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang :

- a) Pendidikan sekolah menengah kejuruan;
- b) Kesehatan rumah sakit rujukan/pratama;
- c) Air minum;
- d) Jalan;
- e) **Sanitasi**;
- f) Pasar;
- g) Irigasi; dan
- h) Energi skala kecil.

DAK Fisik Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bidang :

- a) Perumahan dan pemukiman;
- b) Transportasi; dan
- c) Kesehatan

Dari jenis dan bidang DAK Fisik adapun pengelolaan DAK Fisik di daerah meliputi :

- a) Penganggaran;
- b) Persiapan teknis;
- c) Pelaksanaan;
- d) Pelaporan; dan
- e) Pemantauan dan evaluasi.

Sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis. Standar teknis kegiatan masing-masing DAK Fisik mengacu pada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.

Penyelenggaraan DAK Fisik juga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017

tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menyatakan bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya di sebut DAK adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana infastruktur masyarakat yang belum mencapai standar pelayanan minimal dan norma standar pedoman dan kreteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Raykat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Pasal 5 Ayat (1) DAK Infrastruktur meliputi 5 (lima) bidang, yaitu :

- 1) Bidang Irigasi,
- 2) Bidang Jalan,
- 3) Bidang Air Minum,
- 4) **Bidang Sanitasi, dan**
- 5) Bidang Perumahan dan Pemukiman.

Dari 5 (lima) DAK infrastruktur diatas mempunyai menu kegiatan, sebagai berikut :

- a) Bidang Irigasi:
  1. Pembangunan jaringan irigasi;
  2. Peningkatan jaringan irigasi;dan

3. Rehabilitasi jaringan irigasi;
- b) Bidang Jalan;
1. Pembangunan jalan dan jembatan;
  2. Peningkatan jalan dan penggantian jembatan; dan
  3. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan; dan
- c) Bidang Air minum:
1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal;
  2. Pembangunan SPAM baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum; dan
  3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- d) **Bidang Sanitasi**
1. **Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat; dan**
  2. Pengembangan SPLAD setempat.
- e) Bidang Perumahan dan Permukiman:
1. Subbidang Rumah Swadaya:
    - a) Pembangunan baru (PB)
    - b) Peningkatan kualitas (PK)
  2. Subbidang Rumah Khusus:

Pembangunan rumah khusus yang dilengkapi dengan jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi, air bersih, dan sumber daya listrik.

Bahwa dalam penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Unit Organisasi pengampu penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus yakni Direktorat Jederal Cipta Karya menyusun (Petunjuk Pelaksanan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infastruktur Sub Bidang Sanitasi) dan (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan lapangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penilaian kinerja, pemanfaatan.

Dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi diperlukan pengorganisasian pada berbagai tingkatan, antara lain :

1) Tingkat Pusat

Organisasi pelaksana Kementerian PUPR dan Direkrorat PPLP

2) Tingkat Provinsi

Organisasi pelaksana PSPLP Provinsi, dan Dinas Terkait

3) Tingkat Kabupaten/Kota

Organisasi pelaksana SKPD Teknis

4) Tingkat Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah sepengetahuan Camat menetapkan KSM dan KPP yang merupakan masyarakat pemanfaat dan pengguna pelaksanaan DAK

Sosialisasi kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi diselenggarakan kepada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota pada akhir tahun anggaran sebelumnya yang di selenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat. Serta pada tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh SKPD Teknis mengundang Camat, Kodim (TNI), Kades/Lurah daerah rawan sanitasi dimana sosialisai ini bertujuan agar pemerintah Kabupaten/Kota dapat memahami lingkup kegiatan, dan dapat mempersiapkan lokasi yang memenuhi syarat.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang dengan, jumlah penduduk 238,412 jiwa dan dengan luas wilayah 3.714,19 Km<sup>2</sup> Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 4 Pulau yaitu Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau dan Pulau Rangsang. Secara administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 Kecamatan dan 98 Desa/Kelurahan.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi yang diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana bidang infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.259.000.000-, untuk realisasi kegiatan fisik dan kegiatan penunjang, adapun dana kegiatan fisik sebesar Rp 4.999.050-, digunakan untuk kegiatan fisik pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana sanitasi, gaji dan operasional TFL. Sedangkan untuk dana kegiatan penunjang sebesar Rp 262.950.000-, digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan pengendalian.

Penyaluran besaran alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria

husus, dan kriteria teknis diantara lain :

- a) Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang dicerminkan dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah di kurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- b) Kriteria Khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
- c) Kriteria teknis disusun berdasarkan kegiatan khusus yang dirumuskan oleh kementrian/lembaga.

Dari alokasi diatas diharapkan dapat terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi seperti: pengelolaan air limbah komunal dan skala individual yang berbasis kepada masyarakat.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Dana alokasi Khusus Bidang Sanitasi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi. Selanjutnya dalam menyelenggarakan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus (SKPD DAK) yaitu Organisasi/lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pemilihan Penetapan lokasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui dua tahap seleksi, antara lain sebagai berikut :

1. Daftar Panjang / Longlist

Penetapan calon lokasi penerima kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang

Sanitasi oleh Kabupaten/Kota dapat diambil dari SSK atau memorandum bagi Kabupaten/Kota yang telah ikut Kegiatan Percepatan Pembangunan Permukiman (PPSP).

## 2. Daftar Pendek / Shortlist

Penetapan calon lokasi berdasarkan hasil survey dan indentifikasi daftar panjang yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dan Dinas penanggung jawab kegiatan berdasarkan kelayakan maksimal dengan kreteria umum pemilihan titik lokasi sebagai berikut : Kepadatan penduduk 30 % , Kondisi rawan sanitasi 20 %. Tingkat partisipasi dan kontribusi masyarakat 50 %.

Pemilihan lokasi yang tepat adalah kunci keberhasilan kegiatan ini. penetapan lokasi ditentukan oleh SKPD yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan beberapa calon lokasi menyapaikan surat minat melalui pejabat setingkat RW kepada Dinas terkait dengan tebusan Lurah dan Camat. Calon lokasi sesuai Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dapat diajukan sebagai lokasi shortlist. Dan melakukan pemicuan sosialisasi kegiatan dengan mengundang Kades/Lurah daerah rawan sanitasi yang bertujuan untuk memahami ruang lingkup kegiatan sanitasi dan dapat mempersiapkan lokasi yang memenuhi kriteria.

Dalam kegiatan ini jenis sarana prasarana sanitasi SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) yang dibangun berskala prioritas nasional yang meliputi sektor air limbah berupa IPAL (Instalasi Pengelolaan Air



Limbah) Komunal Kombinasi MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang melayani 25 SR (Salurah Rumah Tangga) yakni seluruh air yang dihasilkan oleh rumah tangga Mandi, Cuci, Kakus, Dapur dan limbah dari rumah tangga yang dialirkan dengan jaringan perpipaan menuju instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

Berikut daftar lokasi Kelurahan/Desa penerima pemanfaat kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Meranti yang penulis paparkan dalam table sebagai berikut :

**Tabel I.1 Lokasi Kelurahan/Desa Penerima Kegiatan Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK (melayani 25 SR) Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Tahun 2017 Di Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Lokasi Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Kelurahan Selatpanjang Selatan	8,459	420.050.000
2.	Desa Sungai Tohor	1,220	416.000.000
3.	Desa Lukun	2,003	416.000.000
4.	Desa Gemalasari	1,098	416.000.000
5.	Desa Gayung Kiri	1,327	416.000.000
6.	Desa Tenggayun Raya	821	416.000.000
7.	Desa Segomeng	1,106	416.000.000
8.	Desa Mengkirau	2,085	416.000.000
9.	Desa Kudap	2,305	416.000.000
10.	Desa Mekar Delima	474	416.000.000
11.	Desa Sesap	517	416.000.000
12.	Desa Kundur	1.095	416.000.000

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Meranti

Dari tabel diatas terdapat 12 lokasi rawan sanitasi diantaranya 1 Kelurahan dan 11 Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari 12 lokasi yang merupakan wilayah rawan sanitasi di Kabupaten Kepulauan Meranti penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian ini pada Kelurahan Selatpanjang Selatandengan pertimbangan kondisi prasarana dan sarana sanitasi di Kelurahan Selatpanjang

Selatan tergolong sangat kurang begitu baik dilihat dari :

- a. Dilihat dari kondisi sarana air bersih, pemenuhan kebutuhan air bersih yang dimanfaatkan sebagian besar masyarakat di Kelurahan Selatpanjang Selatan dalam kebutuhan sehari-hari adalah air sumur gali, sumur bor dan air hujan.
- b. Aktifitas mandi, cuci, kakus (MCK) masyarakat mengandalkan air sumur yang kondisi airnya berwarna hitam.
- c. Masih adanya rumah-rumah yang tidak memiliki jamban atau kakus pribadi sehingga masih ada masyarakat yang menumpang mandi, cuci, kakus (MCK) mereka di tempat umum seperti masjid dll.

Permasalahan atau kondisi sanitasi prasarana dan sarana sanitasi di Kelurahan Selatpanjang Selatan tergolong kurang begitu baik tidak terlepas keterbatasan sarana prasarana infrastruktur dan masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola limbah cair serta rendahnya tingkat perilaku hidup sehat dan bersih yang sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat dilihat dari kondisi tingginya penyakit berbasis lingkungan seperti diare, ISPA, gatal-gatal, DBD.

Salah satu penerima pemanfaat di Kelurahan Selatpanjang Selatan yakni berlokasi di Jalan Ibrahim RT 04, RW 04 dengan luas lahan 340 M<sup>2</sup> dan Gang Ikhlas RT 01, RW 10 dengan luas lahan 20 M<sup>2</sup> dimana titik lokasi luas lahan tanah merupakan lahan tanah Hibah milik masyarakat untuk lokasi kegiatan pembangunan infrastruktur yaitu IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) Komunal Kombinasi MCK (Mandi, Cuci, Kakus) melayani 25 SR (Salurah

Rumah Tangga) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 420.050.000-,. dengan proporsi penggunaan dana pembangunan sarana prasarana sanitasi minimal 60% untuk pengadaan bahan dan sewa alat. maksimal 35 % untuk upah/gaji pekerja. dan maksimal 5 % untuk kegiatan non fisik selama masa pembangunan yang digunakan untuk keperluan kegiatan pembangunan.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan di Kelurahan Selatpanjang Selatan mengacu pada (Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infastruktur Sub Bidang Sanitasi) dan (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) dan pelaksanaan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif dan swakelola oleh masyarakat untuk tingkat Kelurahan/Desa, Lurah/Kepala Desa sepengetahuan Camat dengan menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dan membentuk Kelompok Swadya Masyarakat (KSM) “ Kampung Baru” yang telah dibentuk melalui musyawarah desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) baik secara teknis dan pemberdayaan dalam hal sosialisasi. Setelah tahap pelaksanaan kontruksi kegiatan pembangunan sarana prasarana IPAL Komunal Kombinasi MCK (melayani 25 SR) sudah terbangun secara progres fisik mencapai 100% maka akan diserahkan terimakan kepada (KPP) Kelompok Pengguna dan Pemelihara sebagai penanggung jawab dalam mengoperasikan dan memelihara sarana sanitasi yang telah terbangun, bertanggung jawab dalam hal-hal teknis, mengumpulkan iuran warga dan melestarikan sarana

sanitasi secara berkelanjutan.

Dari uraian diatas, kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan merupakan salah satu solusi dalam penyediaan sarana dan prasarana air limbah permukiman bagi masyarakat dalam hal ini penanganan air limbah rumah tangga dan mendidik masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Dampak kebijakan memberikan nilai-nilai yang berorientasi pada kelompok sasaran. Adapun penulis menemukan fenomena-fenomena disekitar masyarakat sebagai berikut :

- a. Dari kegiatan pembangunan sarana prasarana sanitasi di Kelurahan Selatpanjang Selatan yakni fasilitas (MCK) Mandi, Cuci, Kakus belum berdampak secara maksimal karena masih banyak masyarakat lebih memilih menggunakan fasilitas jamban/kakus pribadi dari pada menggunakan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang sudah terbangun secara layak.
- b. Masih adanya masyarakat yang tidak mau menggunakan dan ikut memelihara kebersihan infrastruktur fasilitas sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang sudah terbangun.
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menggunakan fasilitas sarana sanitasi lingkungan serta rendahnya tingkat perilaku hidup bersih dan sehat dilihat dari sebagian masyarakat yang mengelola air limbah rumah tangga secara sembarangan.

Dari fenomena-fenomena diatas penulis mencoba mengevaluasi kebijakan untuk melihat dampak dan manfaat terhadap masyarakat. Maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul :

“ Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat ( Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ) ”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengevaluasi dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat di Kelurahan Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan serta memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang Ilmu

Pemerintahan, khususnya mengenai Dampak Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka memenuhi akses sanitasi layak dan berkelanjutan.



## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Studi kepustakaan**

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa konsep atau teorisesuai dengan judul penelitian yaitu Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan

Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti). Teori-teori yang digunakan untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

### **1. Konsep Pemerintahan**

Masih Ndraha (2011:364) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan ini terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian atau keadaan.

Menurut Syafiie (2010:6) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan segala pemerintahan secara baik dan benar.

Menurut Ndraha (2010:6) Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadinya didalam hubungan antara anggota masyarakat baik individu dengan individu, kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terjadi pada suatu saat didalam sebuah masyarakat.

Suryadiningrat (1987:9) menjelaskan Pemerintahan dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari pemerintahan :

- a) Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperhatikan.
- b) Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah.
- c) Adanya hubungan fungsional antara yang memberikan dan menerima perintah.
- d) Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberikan perintah.

Menurut Budiarto (2009:21) mengemukakan bahwa Pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan berdasarkan atas Negara rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Sementara itu Wilson (dalam Syaifi 2011:10) Pemerintahan adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation) (dalam Labolo. 2006:22). Untuk mengetahui sesuatu masyarakat, makalahatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan menurut Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) Pemerintahan memiliki dua fungsi dasar, yaitu:



- a) Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provide jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hamkam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.
- b) Fungsi skunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provide kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a) Fungsi Pembangunan
- b) Fungsi pemberdayaan
- c) Fungsi pelayanan

Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

## **2. Konsep Kebijakan Publik**

Menurut Dunn perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

- a) Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.

- b) Penetapan alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- c) Penerapan sarana keputusan, mengguankan berbagai potensi yang di miliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- d) Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan, Dunn (2003;105)

Menurut Ndraha (2003:492-499) kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagian pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

Menurut Ndraha (2011:498) mendefinisikan kebijakan adalah pemerintah sebagai pilihan terbaik usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan.

Wibawa (2011:3) kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksanaang menjelaskan cara cara mencapai suatu tujuan.

Menurut Dwiyanto Indiahono (2009:18) Kebijakan Publik dalam kerangka subsantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya

Menurut Nugroho (2004:100) kebijakan publik dalam praktik ketatanegaran dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu :pertama dalam konteks bagaimana kebijakan merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan), kedua bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi.

Masih Nugroho (2004) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua masalah yang menyangkut bersama dan sejumlah masyarakat di daerah.

Menurut Koryati (2005:7) kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilakukan secara jelas.

Dalam mengukur pelaksanaan kebijakan tersebut Hugo Helgo (dalam N.Dunn 2003:29) menyebutkan kebijakan sebagian suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan (*a course of action intended to accomplish some end*). Definisi Helgo ini selanjutnya di uraikan oleh Charles Jones dalam kaitan dengan beberapa isi ukuran kebijakan yaitu:

- a) Tujuan yaitu tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai.
- b) Renacana atau proposal yaitu alat atau cara untuk mencapai tujuan.
- c) Program atau cara tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau
- d) pengesahan untuk mencapai tujuan.
- e) Dampak (*effect*) yaitu yang ditimbulkan dari suatu program dalam masyarakat.

### **3. Konsep Implementasi kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustiono (2008:195) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:196) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasikan undang-undang yang berkerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang diupauakan oleh kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses, output, dan outcome yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat yaitu tercapainya tujuan kebijakan.

#### **4. Konsep Evaluasi Kebijakan**

##### **a. Pengertian Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Menurut Mardikanto (2013:275) evaluasi sebagai suatu kegiatan, sebenarnya merupakan proses untuk mengetahui atau memahami dan memberi penilaian terhadap suatu keadaan tersebut, melalui kegiatan pengumpulan data atau fakta dan

membandingkan dengan ukuran serta cara pengukuran tertentu yang telah ditetapkan.

Menurut Nugroho (2011:51) evaluasi merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi maupun efektifitas suatu program atau kegiatan.

Menurut Ndraha (2003-201) evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya.

#### **a. Tujuan Evaluasi Kebijakan**

Dalam mengevaluasi kebijakan, ada fokus yang ingin dicapai oleh pengevaluasi. Evaluasi kebijakan memiliki tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut (Subarsono,2005:120-121) :

##### **a) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan**

Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

##### **b) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan**

Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

##### **c) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan**

Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

##### **d) Mengukur dampak suatu kebijakan**

Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.

- e) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan  
Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f) Sebagai bahan melakukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

#### **b. Langkah-Langkah Evaluasi Kebijakan**

Agar suatu kebijakan dapat dievaluasi dengan baik, para ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Dalam bukunya Winarno (2007:230) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

#### **c. Pendekatan Evaluasi**

Menurut William N. Dunn (2003:611-612) evaluasi kebijakan mempunyai dua aspek yang saling berhubungan dengan penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk kegunaan hasil terhadap beberapa orang, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Dunn membedakan tiga jenis pendekatan dalam evaluasi antara lain :

1. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan

dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utamanya adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial.

2. Evaluasi formal (formal evaluation) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utamanya bahwa tujuan dan target dirumuskan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.
3. Evaluasi keputusan teoritis (decision-theoretic evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok evaluasi ini dengan dua jenis pendekatan diatas adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari perilaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan.

#### **d. Model Evaluasi**

Menurut Wayne Parsons (2008:594-552) ada dua macam model evaluasi yang digunakan yaitu :

#### 1. Evaluasi Formatif

Evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program yang sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi”. Pada fase implementasi memerlukan evaluasi “formatif” yang akan memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi.

Rossi dan Freeman dalam buku Parsons mendeskripsikan model evaluasi ini sebagai pada tiga persoalan:

- a) Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat
- b) Apakah penyampaian pelayanan konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak
- c) Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melakukan program.

#### 2. Evaluasi Sumatif

Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur bagaimana kebijakan atau program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya. Model evaluasi ini pada dasarnya adalah model penelitian komparatif yang mengukur beberapa persoalan yaitu :

- a) Membandingkan sebelum dan sesudah program diimplementasikan.



Membandingkan dampak intervensi terhadap satu kelompok dengan lain atau antara satu kelompok yang menjadi subjek intervensi dan kelompok lain yang tidak (kelompok kontrol).

- b) Membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang mungkin terjadi tanpa intervensi.
- c) Atau membandingkan bagaimana bagian-bagian yang berbeda dalam suatu wilayah mengalami dampak yang berbeda-beda akibat dari kebijakan yang sama.

**e. Kreteria Evaluasi**

Mengikuti William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka rating, dan penilaian (assesment), evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai, dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan evaluasi kebijakan publik. Evaluasi pada perumusan dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih pada proses : perumusan dilakukan pada muatan kebijakan yang biasanya hanya menilai apakah prosesnya sudah selesai dengan prosedur yang sudah disepakati.

Kreteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2003), mencakup enam indikator yaitu :

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan tercapai.
  2. Efisiensi, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
  3. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.
  4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan meratakan kelompok dan dapat memuaskan mereka.
  5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka.
  6. Ketetapan, yaitu manfaat atau kegunaan hasil yang diinginkan.
- Adapun menurut Badjuri dan Yunowo dalam Hanif Nucholis (2007:227)

mengatakan ada beberapa aspek umum dalam penilaian (evaluasi) yaitu Input, proses, output, dan outcome, yang akan dijabarkan dalam instrumen yang mencakup parameter dan indikator sebagai berikut :

1. Input

Merupakan masukan-masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : Sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar pendukung.

2. Proses

Merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan indikator :Tepat sasaran atau tidak, tepat guna atau tidak dan efisien atau tidak.

3. Output

Merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : Tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasaran yang tercakup, seberapa

banyak kelompok sasaran yang tertangani, seberapa besar kelompok yang terlibat.

#### 4. Outcome

Merupakan suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, dengan indikator : ada atau tidaknya perubahan target/sasaran, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik.

#### f. Metode Evaluasi

Menurut Ndraha (2003-201) evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya. Ada tiga metode evaluasi yang dikemukakan oleh Ndraha yaitu:

- a) Model *Before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment) tolak ukur adalah kondisi before.
- b) Model *das sollen-das sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan senyatanya, tolak ukur adalah *das sollen*.
- c) Model *kelompok kontrol-kelompok tes*, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan), tolak ukurnya adalah kelompok control.

#### h. Evaluasi Dampak Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata. (Subarsono,2013;122), mengemukakan tentang dampak sebagai berikut, *impact*(dampak) adalah akibat lebih jauh dari pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata pada masyarakat. Hal ini berarti bahwa evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang terjadi sebnarnya dari suatu kebijakan (Winaro,2007)

Menurut Samodra wibawa dkk (1994:29) Evaluasi dampak memberikan perhatian besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya, sekalipun yang terakhir inididak di kesampingkan dari penelitian evaluatif. Dampak yang diharapkan menggunakan pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan. Pada akhir impelemntasi kebijakan menilai pula dampak-dampak yang tak diharapkan yang tak terduga , yang diantaranya ada yang diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tak diinginkan.

Sedangkan pengertian evaluasi dampak kebijakan yang diungkapkan Dunn dalam Wibaba (1994:5) dalam evaluasi dampak kebijakan membedakan konsekuensi kebijakan menjadi dua jenis, yaitu output dan dampak. Output adalah barang dan jasa atau fasilitas lain yang diterima sekelompok masyarakat tertent,

baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Sedangkan dampak adalah kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan.

Dampak menurut JE. Hosio (2007:57) adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak terhadap sikap dan tingkah laku.

Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kaitanya dengan dampak kebijakan, perlu dipahami akan adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan.

Menurut Langbein dalam Wibawa (1994:38), dimensi dampak disoroti oleh :

- a) Waktu  
Dimensi ini merupakan dimensi yang penting terkait dengan kebijakan yang akan memberikan dampak sekarang dan yang akan mendatang.
- b) Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan  
Evaluator perlu memperhatikan dampak-dampak yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan yang diharapkan.
- c) Tingkat agregasi dampak  
Dampak yang dirasakan secara individual akan dapat mempengaruhi pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan
- d) Tipe dampak, yaitu
  - a) Dampak pada kehidupan ekonomi.
  - b) Dampak pada proses pembuatan kebijakan.
  - c) Dampak pada sikap publik.
  - d) Dampak pada kualitas kehidupan individu kelompok, dan masyarakat yang bersifat non ekonomis.

Irwan (2014:66) dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai berikut dari output kebijakan. Akibat dari output kebijakan ada dua macam yakni :

- a. Akibat yang dihasilkan oleh suatu interensi proram pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan) dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact).
- b. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak akibat tersebut tidak mampu menimbulkan prilaku baru pada kelompok sasaran (effects).

Pada sisi yang lain, Thomas R. Dye dalam Winarno (2002:171-173) menyatakan dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi.

- a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- b. Kebijakan-kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
- c. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- d. Dimensi yang terakhir dari evaluasi kebijakan adalah menyangkut biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

## 5. Konsep Sanitasi Lingkungan

Sanitasi dalam bahas inggris berasal dari kata *sanitation* yang diartikan sebagai penjagaan kesehatan. Menurut Soemirat (2004:10) mengungkapkan bahwa sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia.

Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoadmojo,2003)

Selanjutnya Kusnuputranto (1986) mengatakan sanitasi lingkungan (*Environmental sanitary*) sebagai usaha pengendalian dari semua faktor –faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan hal-hal yang merugikan.

Dari beberapa definsis tentang sanitasi lingkungan pada hakikatnya adalah kondisi atau keadaan lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan dan lingkungan yang mencakup penyehatan lingkungan perumahan permukiman, pembuangan kotoran manusia (tinja), penyediaan air bersih dan pembuangan sampah serta air limbah.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1 Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zudika Dm Manullang (10090302)	Skripsi Evaluasi Dampak Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Dalam	- Sama-sama meneliti Program Prioritas Nasional - Untuk melihat	- Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif - Menggunakan indikator William N.

		Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan)	dampak program	Dunn (2003:608-610) - Lokasi penelitian di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan
2.	Rizky Pratama Putra, Soesilo Zauhar, Abdullah Said	Jurnal Dampak Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Masyarakat (Studi pada Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto utomo Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang)	- Sama-sama meneliti tentang Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi - Penelitian ini untuk mengetahui perubahan dan dampak setelah dilaksanakannya program	- Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif - Menggunakan analisis model Spardlely - Lokasi penelitaian di Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang
3.	Moh. Fajar Nugraha	Dampak Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik	- Melihat Dampak Program Sanitasi	- Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif - Teknik penentuan informan secara purposive dengan teknik snowball.
4.	Ivan Kurnia Adi dan	Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam	- Melihat dampak	- Teknik penentuan



	Mardwi Rahdriawan	Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PSBM) di Kelurahan Mangunharjo, Semarang. Jurnal Pengembangan Kota	dalam pelaksanaan pengelolaan sarana prasarna sanitasi	responden secara purposive sampling dengan teknik jenuh - Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan
--	----------------------	--	--	---

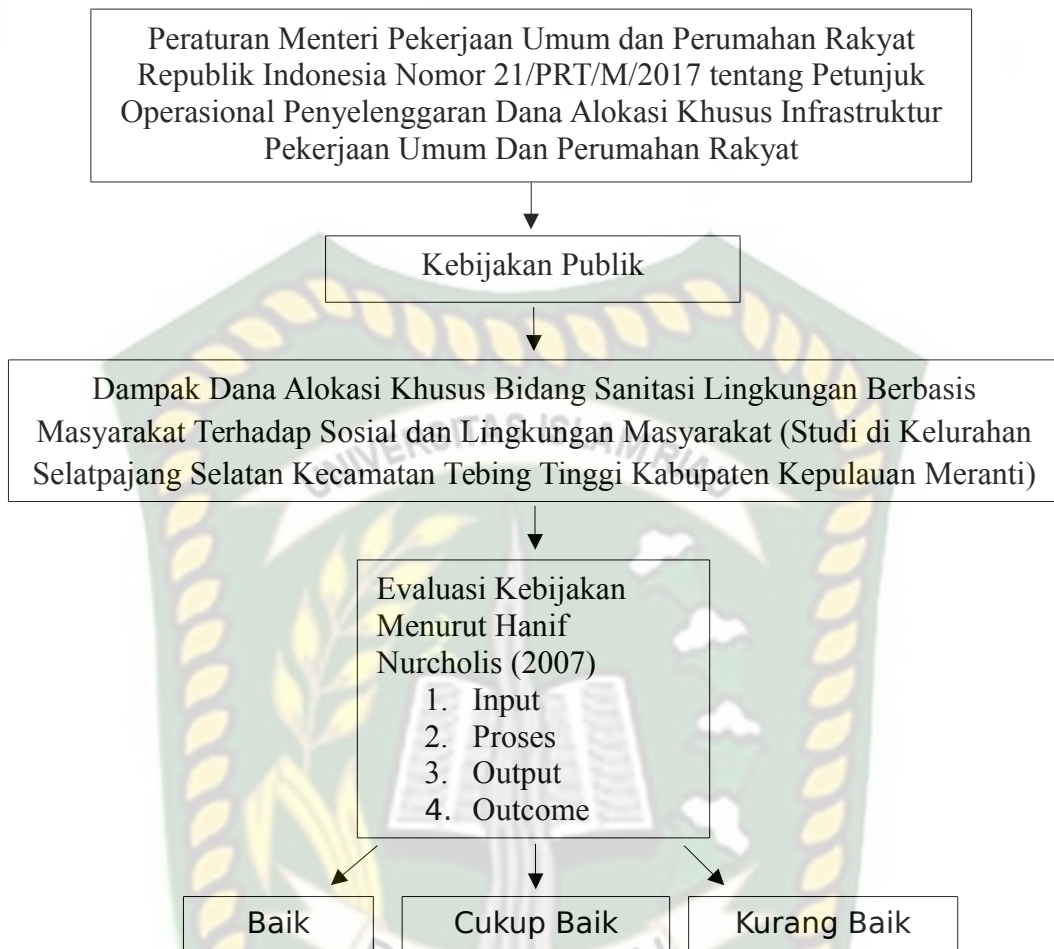
Sumber : Data Olahan, Tahun 2019

### C. Kerangka Pikir

**Gambar II.1 Kerangka pikiran tentang Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti)**

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016  
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik





Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2019

#### D. Konsep Operasional

Definisi operasional adalah satuan definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai macam-macam nilai.

Berikut akan disusun dalam bentuk konsep operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan adalah Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
2. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi adalah usaha untuk menentukan atas Implementasi Kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran atau tujuan kebijakan.
4. Input merupakan masukan-masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar pendukung.
5. Proses merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan indikator : tepat sasaran atau tidak, tepat guna atau tidak dan efisiensi atau tidak.
6. Output yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasaran yang tercapai, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani, seberapa besar kelompok terlibat.
7. Outcome yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, dengan

indikator : ada atau tidaknya perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi kepada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.



#### E. Operasional Variabel

**Tabel II.2 Operasional variabel tentang Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti)**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran
Menurut Dwiyanto	Terhadap Sosial	1. Input	a. Adanya peraturan Dana Alokasi	Nominal

<p>Indiahono (2009:18) Kebijakan Publik dalam kerangka subsantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya</p>	<p>dan Lingkungan Masyarakat di kelurahan Selatpanjang Selatan</p>	<p>2. Proses</p> <p>3. Output</p> <p>4. Outcome</p>	<p>Khusus Bidang Sanitasi</p> <p>b. Besaran alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi</p> <p>c. Adanya sarana prasarana yang terbangun</p> <p>a. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan sarana prasarana sanitasi</p> <p>b. Partisipasi masyarakat dalam memelihara sarana prasarana sanitasi</p> <p>c. Hambatan-hambatan dalam mengguakan dan memelihara sarana prasarana sanitasi</p> <p>a. Tercapainya tujuan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan</p> <p>b. Adanya manfaat yang dirasakan</p> <p>a. Adanya perubahan sosial</p> <p>b. Adanya kondisi lingkungan yang bersih</p>	<p>Nominal</p> <p>Nominal</p> <p>Nominal</p>
--	--	---	--	--

Sumber : Data Olahan, Tahun 2019



#### F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Baik, Cukup Baik, Kurang Baik.

Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori baik berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori cukup baik berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik berada pada 0%-33%

Adapun pengukuran untuk indikator penelitian ini adalah :

1. Input, dikategorikan :

Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori baik berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori cukup baik berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik berada pada 0%-33%

2. Proses, dikategorikan :

Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori baik berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori cukup baik berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik berada pada 0%-33%

3. Output, dikategorikan :

Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori baik berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori cukup baik berada pada 34%-66%

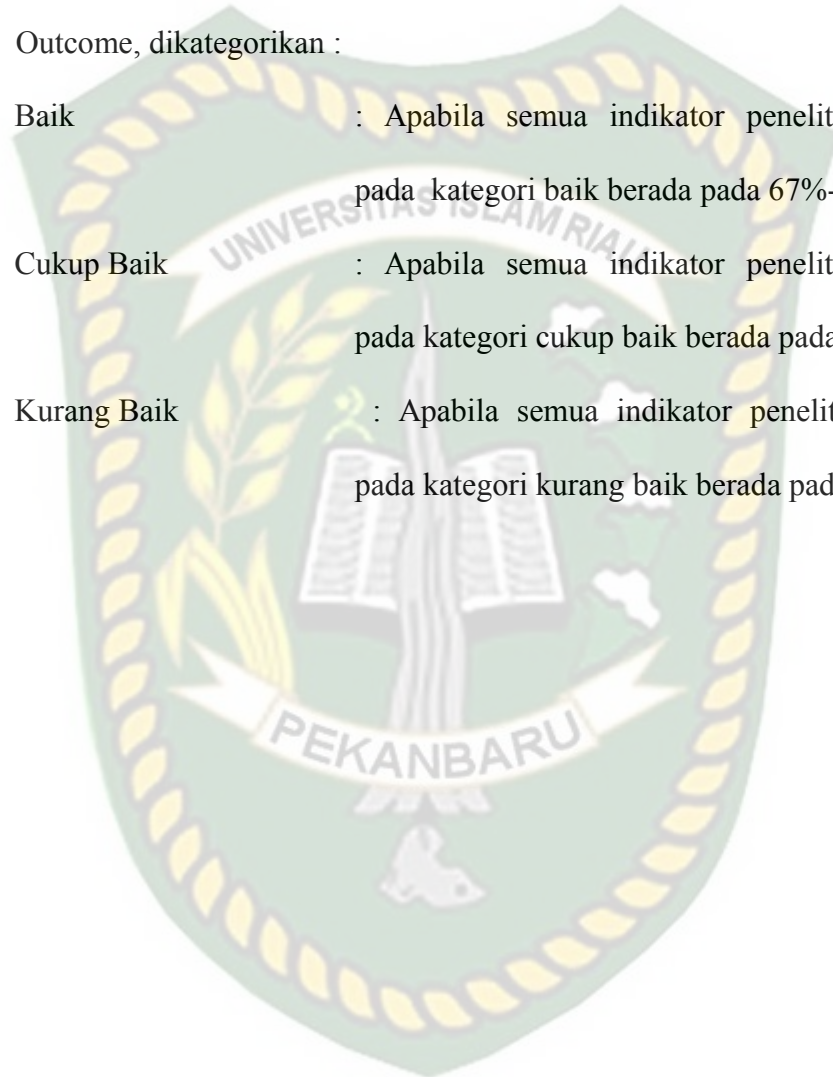
Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik berada pada 0%-33%

4. Outcome, dikategorikan :

Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori baik berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori cukup baik berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik berada pada 0%-33%



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tipe Penelitian



Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:13) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif adapun pengertian deskriptif menurut sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memerikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya , tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

### **B. Lokasi Penelitian**

Menurut Usman (2009:41) penetapan lokasi penelitian dimaksud untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan tepatnya berlokasi di Jalan Ibrahim RT 04, RW 04 dan di Gang Ikhlas RT 01, RW 10 di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai lokasi yang kondisi sanitasi lingkungannya tergolong begitu kurang baik.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang dapat ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, selanjutnya sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (Sugiyono, 2012:80).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lurah Selatpanjang, RT, RW, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Baru, dan Masyarakat Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP). Untuk mengetahui lebih jelas perincian populasi dan sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III.1 Tabel populasi dan Sampel Penelitian**

No	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase %
		Populasi	Sampel	
1	Lurah Selatpanjang Selatan	1	1	100%
2	RT	29	1	10%
3	RW	10	1	10%
4	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	2	1	50%
5	Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Baru	1	1	100%
6	Masyarakat Kelompok Penerima Pemanfaat (KK)	2.413	50	90%
Jumlah		2.456	55	-

Sumber : Data Olahan, Tahun 2019

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan sample yaitu untuk Lurah Selatpanjang Selatan, RT, RW, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Baru menggunakan teknik “sensus” yaitu penarikan sample secara keseluruhan dari semua populasi yang ada.

Sedangkan untuk Masyarakat (KPP) Kelompok Penerima Pemanfaat dilakukan menggunakan teknik sample “purposive sampling” yaitu penarikan pada responden yang dianggap mengetahui masalah penelitian. Dengan penentuan jumlah sampel menggunakan teknik metode slovin. sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian. Karena tidak semua masyarakat menggunakan fasilitas dari adanya program penyediaan sarana prasarana sanitasi di Kelurahan Selatpanjang Selatan.

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

Dimana

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan presentase semangkin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah :

### 1. Data Primer

Menurut Iskandar (2008:257) yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Dalam hal ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berberkaitan dengan Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)

### 2. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008:253) data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

### 1. Observasi

Menurut Usman (2009:52) teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini

dilakukan dengan cara dating, pendekatan, dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder.

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan lapangan untuk mendapat data tentang Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)

## 2. Kuisisioner

Menurut Usman (2009:57) kuisisioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Dalam hal ini penulis memberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk di isi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi tentang Dampak Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat di Kelurahan Selatpanjang Selatan.

## 3. Wawancara

Menurut Riduwan (2009:31) wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab kepada Kepala Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan

KawasanPemukimanKabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bapak Saiful Bakri, ST sebagai narasumber informasi untuk memperoleh data.

#### 4. Dokumentasi

Menurut Riduwan (2009:31) teknik dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan. Teknik ini digunakan untuk mendapat konsep teori penelitian ini.

#### G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif secara deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan berdasarkan kondisi yang ada dilapangan penelitian. Setelah data yang di perlukan oleh penulis tersebut telah terkumpul maka data tersebut akan diperoleh dengan melakukan pengelompokan-pengelompokan data yang sesuai dengan jenis data yang diperoleh , lalu dipelajari serta dilakukan analisis secara deskriptif, maksudnya adalah dengan memberikan gambaran dan memaparkan data secara umum yang diperoleh berdasarkan dengan kenyataan dilapangan tentang Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di kelurahan Selatpajang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti)

#### H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 Jadwal kegiatan penelitian tentang Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di kelurahan Selatpajang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti)**

N	Jenis	Tahun 2019
O	Kegiatan	Bulan dan Minggu

		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP	■																			
2.	Seminar UP		■																		
3.	Revisi UP			■																	
4.	Revisi Kuisisioner				■																
5.	Rekomendasi Survey					■															
6.	Survey Lapangan						■														
7.	Analisis Data									■											
8.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)													■							
9.	Bimbingan Skripsi														■						
10.	Ujian Konferehensif Skripsi																				■
11.	Revisi Skripsi																				■
12.	Penggandaan Skripsi																				■

Sumber : Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fisipol-UIR, 2019

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dengan ibu kota Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki jumlah penduduk 238,412 jiwa dan dengan luas wilayah 3.714,19 Km<sup>2</sup>

Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 4 Pulau yaitu Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau dan Pulau Rangsang.

Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan pulau Tebing Tinggi. Secara administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 Kecamatan dan 98 Desa/Kelurahan, 9 Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
2. Kecamatan Tebing Tinggi.
3. Kecamatan Tebing Tinggi Timur.
4. Kecamatan Rangsang.
5. Kecamatan Rangsang Pesisir.
6. Kecamatan Rangsang Barat.
7. Kecamatan Merbau.
8. Kecamatan Pulau Merbau.
9. Kecamatan Putri Puyu.

#### **B. Kecamatan Tebing Tinggi**

Kecamatan Tebing Tinggi merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai jumlah penduduk 56.192 jiwa dengan luas wilayah 81 Km<sup>2</sup> dan memiliki 9 Kelurahan/Desa Diantaranya:

1. Desa Sesap.
2. Desa Banglas Barat.
3. Desa Banglas.
4. Kelurahan Selat Panjang Timur.
5. Kelurahan Selat Panjang Selatan.
6. Desa Alah Air.
7. Desa Alah Air Timur.
8. Kelurahan Selat Panjang Barat.
9. Kelurahan Selat Panjang Kota.

#### **C. Kelurahan Selatpanjang Selatan**

Terbentuknya Kelurahan Selatpanjang Selatan terjadi mengalir begitu saja, karena letaknya yang berdekatan Kota, hal ini diawali pada Tahun 1970



terbentuknya sebuah Desa yang diberi nama Desa Muda. Desa ini terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Rintis dan Dusun Kampung Baru, dimana Kampung Baru merupakan Desa termuda pada waktu itu.

Desa Muda pada waktu itu masih dipenuhi kebun-kebun sagu dan kebun liar, setahun kemudian tepatnya tahun 1971, penduduk pribumi yakni Melayu mulai membuka dengan menjual tanah dan kebun mereka sehingga Desa Muda semakin ramai.

Tepatnya pada Tahun 1985 Desa Muda berubah menjadi Kelurahan yang diberi nama Kelurahan Selatpanjang yang diperjelas dengan batas-batas wilayah, dimana :

- Sebelah Utara batasan dengan Kelurahan Selatpanjang Barat
- Sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Desa Banglas dan Desa Alah Air
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Selatpanjang Kota

#### **D. Keadaan Geografis**

Kelurahan Selatpanjang Selatan merupakan salah satu Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang secara geografis wilayah berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kelurahan Selatpanjang Barat
- Sebelah Barat : Desa Alah Air Laut

- Sebelah Selatan : Desa Banglas Barat
- Sebelah Timur : Kelurahan Selatpanjang Kota

Luas wilayah Kelurahan Selatpanjang Selatan sekitar 1,5 km<sup>2</sup>, dan secara administratif Kelurahan Selatpanjang Selatan memiliki 29 Rukun Tetangga (RT) dan 10 Rukun Warga (RW). Sedangkan untuk jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 2 km, jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 2 km, ke Ibu Kota Provinsi 148 km.

#### E. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data administrasi Kelurahan Selatpanjang Selatan, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 8.680 jiwa, dengan kepala keluarga berjumlah 2.407 KK. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kelurahan Selatpanjang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.I Jumlah penduduk menurut jenis kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4.432
2	Perempuan	4.248
	Jumlah	8.680

*Sumber: Kantor Kelurahan Selatpanjang Selatan 2019*

#### F. Pendidikan

Berdasarkan data administrasi Kelurahan, jumlah Kelurahan Selatpanjang Selatan menurut jenis pendidikan adalah tamat TK, SD, SMP, SMA, Akademik (D.I-D.III), dan Sarjana (S.1-S3). Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pendidikan Kelurahan Selatpanjang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.2 Jumlah penduduk menurut jenis pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	TK	252	8,06 %
2	SD	258	8,25 %
3	SMP	379	12,12 %
4	SMA	1.914	61,22 %
5	Perguruan Tinggi	323	10,33 %
Jumlah		3.126	100 %

Sumber: Kantor Kelurahan Selatpanjang Selatan 2019

Berdasarkan dari data diatas, maka dapat dilihat mayoritas penduduk Kelurahan Selatpanjang Selatan yang tamat TK adalah 252 atau 8,06, tamat SD adalah 258 atau 8,25 %, tamat SMP adalah 379 atau 12,12 %, tamat SMA adalah 1.914 atau 61,22 %, tamat Perguruan Tinggi adalah 10,33 %.

#### **G. Mata Pencaharian Penduduk**

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kelurahan Selatpanjang Selatan adalah Wiraswasta. Disamping mata pencaharian sebagai Wiraswasta penduduk Kelurahan Selatpanjang Selatan juga ada yang berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) / Polisi Republik Indonesia (POLRI), Swasta, dan yang Lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Kelurahan Selatpanjang Selatan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel IV.3 Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Wiraswasta	2.182	75,84 %
2	PNS	202	7,02 %
3	TNI/POLRI	12	0,41 %
4	Lainnya	481	16,71 %
Jumlah		2.877	100%

Sumber: Kantor Kelurahan Selatpanjang Selatan 2019

## H. Pemerintahan Kelurahan

Pemerintahan Kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan adalah Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Untuk lebih jelasnya mengenai Pemerintahan Kelurahan dan perangkat Kelurahan Selatpanjang Selatan, penulis paparkan pada tabel berikut ini :

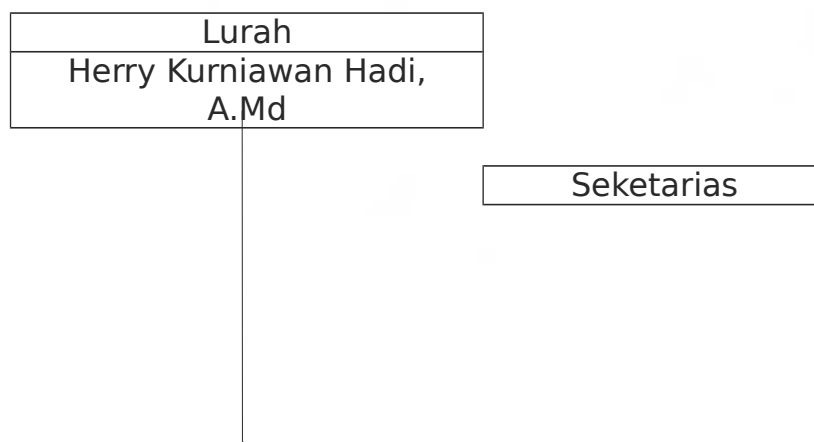
**Tabel IV.4 Jumlah Pemerintah Kelurahan Selatpanjang Selatan**

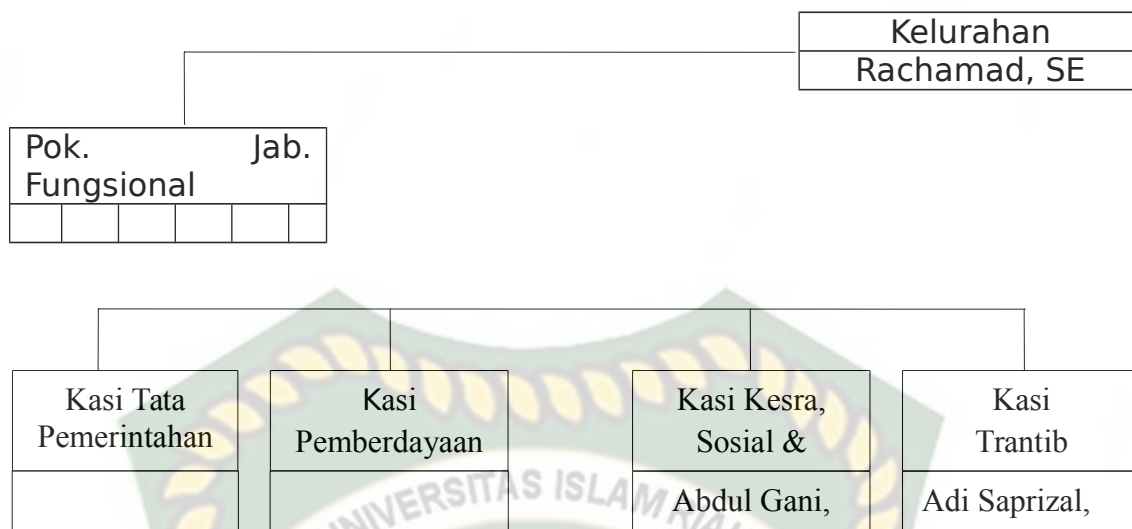
No	Jabatan	Jumlah
1	Lurah	1
2	Sekretariats Kelurahan	1
3	Kasi Pemerintahan dan Ketertiban	1
4	Kasi Pelayanan Umum	1
5	Kasi Kesejahteraan Sosial	1
6	Staf	10
	Jumlah	15

Sumber: Kantor Kelurahan Selatpanjang Selatan 2019

Dilihat dari tabel diatas, maka jumlah Pemerintahan Kelurahan berjumlah 15 orang. Adapun struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan Selatpanjang Selatan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Selatpanjang Selatan**





*Sumber: Kantor Kelurahan Selatpanjang Selatan 2019*

Dari gambar diatas, maka dapat dilihat susunan serta alur kerja dari masing-masing bagian Pemerintahan Kelurahan Selatan Selatan, yang mana di pimpin seorang Lurah dan dibantu oleh Seorang sekretaris Lurah dan 3 (tiga) orang Kasi serta 10 (sepuluh) orang Staf lainnya.

Adapun Visi dan Misi Kelurahan Selatpanjang Selatan :

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan kelurahan. Menyusun visi Kelurahan Selatpanjang ini dilakukan dengan pendekatan parsipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kelurahan Selatpanjang Selatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Visi Kelurahan Selatpanjang Selatan adalah :

“TERDEPAN DALAM MELAYANI MASYRAKAT”

Selain penyusunan Visi juga telah di tetapkan Misi-Misi yang menguatkan suatau pernyataan yang harus dilakukan oleh Kelurahan agar tercapainya Visi Kelurahan Selatpanjang Selatan tersebut. Visi berada ditas Misis, dimana pernyataan Visi kemudian dituangkan kedalam Misi agar dapat dikerjakan.

Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunan menggunakan pendekatan partisipatif, pertimbangan, potensi dan kebutuhan Kelurahan Selatpanjang Selatan adalah :

- MENEGAKKAN DISIPLIN APARAT
- MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
- MENINGKATKAN SDM APARAT
- MENGOPTIMALKAN PELAYANAN

#### **I. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Kepulauan Meranti**

Visi Sanitasi Kabupaten Kepulauan Meranti :

“ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang madani, serta berperilaku hidup bersih dan sehat melalui pembangunan sanitasi yang mandiri pada tahun 2020 ”

Misi Sanitasi Kabupaten Kepulauan Meranti :

1. Misi Air Limbah Domestik
  - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (*On-site*)
  - b. Mengembangkan sistem pengelolaan Air Limbah yang efektif, efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya air dan lingkungan.
  - c. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

- d. Optimalisasi potensi berbagai sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan Air Limbah.
  - e. Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan Air Limbah.
2. Misi Persampahan
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah
  - b. Mengurangi timbulan smapah dalam rangka pengelolan sampah yang berkelanjutan.
  - c. Meningkatkan prasarana dan sarana serta manajemen pengelolaan persampahan.
  - d. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta.
  - e. Optimalisasi potensi berbagai sumber pendanaan.
  - f. Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolan persampahan.
3. Misi Drainase
- a. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana drainase dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat.
  - b. Meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah menuju ke arah kemandirian.

- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sarana drainase serta mendorong partisipatif masyarakat.
- d. Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan drainase.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Sebelum melanjutkan pada pembahasan bab selanjutnya, yaitu pada BAB V, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan dan memaparkan identitas



responden dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat. Adapun indentitas responden yang akan dibahas dalam menujung hasil penelitian ini berupa jenis pendidikan, jenis umur dan jenis pekerjaan.

### 1. Jenis Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan diperlukan dalam diri seseorang karena akan sangat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakannya. Berkenaan dengan jenis pendidikan responden masyarakat Kelurahan Selatpanjang Selatan terdiri dari tidak bersekolah 3 orang, jenjang SD 19 orang, SMP sederaja 15 orang, SMA 13 orang, Diploma Tiga (D3) 2 orang, Strata Satu (S1) 3 orang untuk lebih jelasnya mengenai jenis pendidikan responden, berikut penulis paparkan pada tabel ini :

**Tabel V.1 Jumlah Responden dari Lurah Selatpanjang Selatan, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), RT, RW, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Baru, Masyarakat Kelompok Pengguna Pemelihara (KPP) berdasarkan jenis pendidikan.**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tidak Sekolah	3	5,45 %
2	SD	19	35 %
3	SMP	15	27,27 %
4	SMA	13	24 %%
5	Diploma Tiga (D3)	2	4 %
6	Strata Satu (S1)	3	5,45 %
Jumlah		55	100 %

Sumber : Data olahan 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui jenis pendidikan responden sebagian besar adalah tidak sekolah berjumlah 3 orang atau 5,45 %, kemudian SD sederajat yang berjumlah 19 orang atau 35 %, kemudian untuk SMP sederajat 15 orang atau 27,27 %, kemudian untuk SMA sederajat 13 orang atau 24 %, kemudian Diploma

Tiga (D3) 2 orang atau 4 % dan Strata Satu (S1) 3 orang atau 5,45 %. Dari keseluruhan dari jenis pendidikan responden yang tertinggi adalah tamatan SD.

## 2. Jenis Umur

Berkeaan dengan jenis umur responden masyarakat Kelurahan Selatpanjang Selatan berkisar anantara 20-30 adalah 4 orang, 31-40 adalah 11 orang, 41-50 adalah 23 orang, 51-60 adalah 15 orang ,61-70 adalah 2 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis umur responden, berikut penulis paparkan pada tabel berikut ini :

**Tabel V.2 Jumlah Responden dari Lurah Selatpanjang Selatan, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), RT, RW, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Baru, Masyarakat Kelompok Pengguna Pemelihara (KPP) berdasarkan jenis umur.**

No	Jenis umur	Jumlah	Presentase
1	20-30	4	7 %
2	31-40	11	20 %
3	41-50	23	42 %
4	51-60	15	27 %
5	61-70	2	4 %
Jumlah		55	100%

Sumber : Data olahan 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui jenis umur responden sebagai besar berkisar antara 20-30 adalah 4 orang atau 7 %, kemudian 31-40 adalah 11 orang atau 20 %, 41-50 adalah 23 orang atau 42 %, 51-60 adalah 15 orang atau 27 %, dan sedangkan 61-70 adalah 2 orang atau 4 %. Dari keseluruhan jenis umur responden yang tertinggi adalah berkisar diantara 41-50 adalah 23 orang atau 42 %.

## 3. Jenis Pekerjaan

Berkeenan dengan jenis pekerjaan masyarakat Kelurahan Selatpanjang Selatan adalah sebagai Wiraswasta berjumlah 22 orang, Pegawai Sipil Negeri (PNS) berjumlah 5 orang, dan Lain-lainya 28 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis pekerjaan responden, berikut penulis paparkan pada tabel berikut ini :

**Tabel V.3 Jumlah Responden dari Lurah Selatpanjang Selatan, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), RT, RW, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Baru, Masyarakat Kelompok Pengguna Pemelihara (KPP) berdasarkan jenis pekerjaan.**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Wiraswasta	22	40 %
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5	9 %
3	Lain-lainya	28	51 %
Jumlah		55	100%

Sumber : Data olahan 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui jenis pekerjaan responden sebagian besar adalah Wiraswasta berjumlah 22 orang atau 40%, kemudian Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 5 orang atau 9 %, dan Lain-lainya adalah 28 orang atau 51 %.

#### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Salah satu kebijakan Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum yaitu dengan adanya kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki sanitasi dasar dan penyediaan sarana dan prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan, dan drainase bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan padat penduduk, kumuh, dan rawan sanitasi. Untuk menjamin keberlanjutan kegiatan yang berbasis masyarakat dibutuhkan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat untuk menjamin keberlanjutan kegiatan dilakukan secara

parsipatif oleh masyarakat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Baru dan Kelompok Pengguna Pemelihara (KPP). Dan tentunya diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan perubahan bagi masyarakat sasaran. terlihat dari terbangunya fasilitas sarana IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kombinasi MCK (Mandi,Cuci,Kakus) untuk permukiman masyarakat berguna memudahkan masyarakat dalam mengelola air limbah baik air limbah rumah tangga dan air limbah khususnya tinja dan berkurangnya pencemaran air dan tahan di lingkungan masyarakat, dan memberikan perubahan seperti berkurangnya penyakit yang timbul akibat lingkungan yang buruk. Namun dari adanya fasilitas masih adanya sebagian masyarakat yang belum mau menggunakan fasilitas yang ada dan lebih memilih menggunakan fasilitas jamban secara pribadi yang sebenarnya fasilitas jamban sebagian masyarakat belum sesuai standar layak.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan juga dibutuhkan dalam keterlibatan dalam proses memanfaatkan serta memelihara fasilitas sarana prasarana yang sudah terbangun. Untuk mengetahui Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti penulis memaparkan dalam beberapa indikator sebagai berikut :

### **1. INPUT**

Menurut Hanif Nurcholis (2007;227) dalam penilaian evaluasi kebijakan yakni Input adalah masukan-masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan

kebijakan. Adapun indikatornya seperti sumber daya pendukung dan bahan-bahan pendukung.

Dalam penelitian ini Input dapat diartikan sebagai tolak ukuran suatu proses standar terpenuhinya sasaran tujuan dalam pelaksanaan Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.4 Tanggapan Responden penelitian mengenai Input Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya peraturan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	23	20	12	55
2	Besaran anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	32	16	7	55
3	Adanya sarana prasarana yang terbangun	23	24	8	55
Jumlah		78	60	27	165
Rata-rata		26	20	9	55
Presentase		47,27 %	36,36 %	16,36 %	100%

Sumber : Data olahan 2019

Dari tabel V.4 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai input Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)

adalah 55 orang yang dijadikan sebagai responden 26 orang dengan presentase (47,27 %) menyatakan Baik, sebanyak 20 orang dengan presentase (36,36%) menyatakan Cukup Baik dan sebanyak 9 orang dengan presentase (16,36 %) menyatakan Kurang Baik.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jawaban responden didominasi dalam kriteria Baik artinya Input dalam penelitian ini sudah Baik. Dilihat dari item penilaian adanya peraturan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi berdasarkan hasil jawaban yang mempunyai tanggapan Baik 23 orang, yang menjawab Cukup Baik 20 orang, dan sementara itu sebanyak 12 orang menjawab Kurang Baik.

Sedangkan pada item penilaian besaran anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi di dominasi oleh Baik 32 orang, yang menjawab Cukup Baik 16 orang, sementara yang menjawab Kurang Baik 7 orang.

Selanjutnya pada item penilaian sarana prasarana yang terbangun berdasarkan hasil jawaban responden Baik 23 orang, yang menjawab Cukup Baik 24 orang, sementara yang menjawab Kurang Baik 27 orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, Perumahan Permukiman Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti pada Hari Senin, 19 Agustus 2019 beliau mengatakan :

*Mengenai hal input, dalam kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan*

*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan dalam mekanisme pelaksanaan di analisis secara bertahap mulai dari perencanaan, pembangunan konstruksi, operasional dan pemeliharaan mengacu dan mengikuti (Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur sub bidang sanitasi) dan (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) dimana tujuan dari peraturan yang ada bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan program.*

*Dan untuk besaran anggaran dana yang diterima oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Baru di Kelurahan Selatpanjang Selatan sebesar sebesar Rp 420.050.000-, (Empat ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) yang di peruntukkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur sarana prasarana sanitasi IPAL Komunal Kombinasi MCK (melayani 25 SR)*

Penulis juga melakukan observasi dilapangan untuk melakukan pengamatan dan penulis menemukan adanya peraturan-peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang mengacu pada (Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sanitasi ) dan (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) untuk menjamin keberlanjutan kegiatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisa penulis berdasarkan tabel per sub indikator yang berasal dari kuisioner sebaran serta hasil wawancara

dengan Kepala Bidang Sanitasi dapat ditarik kesimpulan dalam hal input adalah berada dalam presentase 47,27 % dikategorikan Baik. Dilihat dari adanya peraturan, adanya anggaran dapat terbangun sarana yang sesuai kebutuhan masyarakat sehingga sudah bisa dikatakan baik dalam hal mengenai proses tolak ukur Input dalam penelitian ini.

## 2. Proses

Menurut S. Handayanigrat (1988:20) dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Studi dan Administrasi*. Bahwa proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan.

Sedangkan menurut JS Badudu dan Sultan M Zain (1996:1092) dalam kamus Bahasa Indonesia, proses adalah jalanya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau berjalannya tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan.

Dari uraian diatas proses dalam penelitian ini merupakan bagian sebuah proses kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang ditentukan melalui seberapa banyak usaha atau layanan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Dalam hal ini untuk mengetahui tanggapan responden mengenai proses Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.5    Tanggapan Responden penelitian mengenai Proses Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan**



**Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Partisipasi masyarakat dalam menggunakan sarana prasarana	10	34	11	55
2	Partisipasi masyarakat dalam memelihara sarana prasarana	19	30	6	55
3	Hambatan-hambatan dalam menggunakan dan memelihara sarana prasarana	19	32	4	55
Jumlah		48	96	21	165
Rata-rata		16	32	7	55
Presentase		29 %	58,18 %	13 %	100%

Sumber : Data olahan 2019

Dari tabel V.5 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Proses Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti) adalah 55 orang yang dijadikan sebagai responden 16 orang dengan presentase (29 %) menyatakan Baik, sebanyak 32 orang dengan presentase (58,18 %) menyatakan Cukup Baik dan sebanyak 7 orang dengan presentase (13 %) menyatakan Kurang Baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jawaban responden didominasi dalam kriteria Cukup Baik artinya Proses dalam penelitian ini sudah Cukup Baik. Dilihat dari item penilaian partisipasi masyarakat dalam menggunakan dan sarana prasarana berdasarkan hasil jawaban yang mempunyai tanggapan Baik 10 orang,

yang menjawab Cukup Baik 34 orang, dan sementara itu sebanyak 11 orang menjawab Kurang Baik.

Sedangkan pada item penilaian partisipasi masyarakat dalam memelihara sarana prasarana di dominasi oleh Baik 19 orang, yang menjawab Cukup Baik 30 orang, sementara yang menjawab Kurang Baik 6 orang.

Selanjutnya pada item penilaian hambatan-hambatan dalam menggunakan dan memelihara sarana prasarana berdasarkan hasil jawaban responden Baik 19 orang, yang menjawab Cukup Baik 32 orang, sementara yang menjawab Kurang Baik 4 orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, Perumahan Permukiman Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti pada Hari Senin, 19 Agustus 2019 beliau mengatakan :

*Dalam proses, masyarakat cukup berpartisipasi dalam menggunakan dan memelihara fasilitas sarana sanitasi. Namun belum semua masyarakat ikut dan mau menggunakan fasilitas sarana sanitasi yang terbangun. Adapun hambatan dalam tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan dan memelihara fasilitas sarana IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kombinasi MCK (Mandi,Cuci,Kakus) disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dengan pentingnya sanitasi dan tingkat partisipasi dalam menjaga kebersihan fasilitas,rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sanitasi dilihat dari banyak nya masyarakat yang tidak mau menggunakan fasilitas MCK dan masih berperilaku Buang Air Besar Sembarangan hambatan dalam memelihara*

*juga disebabkan kurangnya pembiayaan dalam mengganti kerusakan pada fasilitas sarana.*

Penulis juga melakukan observasi dilapangan untuk melakukan pengamatan langsung yang berlokasi di Jalan Ibrahim RT 04, RW 04 dan di Gang Ikhlas RT 01, RW 10 di Kelurahan Selatpanjang Selatan dimana penulis menemukan masih ada sebagian masyarakat yang belum mau menggunakan dengan kurang partisipasi dengan beberapa faktor yaitu jauhnya akses sarana Mandi, Cuci, Kakus dengan rumah mereka dan masih nyaman dengan kebiasaan mereka sebelumnya dalam mengelola air limbah. Dan dalam hal pemeliharaan sarana masyarakat masih kurang berpartisipasi dilihat kotornya fasilitas disebabkan kurang terawatnya kebersihan fasilitas sarana Mani, Cuci, Kakus (MCK).

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisa penulis lakukan berdasarkan tabel per sub indikator yang berasal dari kuisioner sebaran serta hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, Perumahan Permukiman Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti dapat ditarik kesimpulan dalam hal proses adalah berada dalam presentase 58,18 % dikategorikan Cukup Baik. Proses dalam penelitian ini dilihat masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam ikut serta mendorong program pemerintah dalam permasalahan sanitasi lingkungan dan masih kurangnya pemahaman sebaigian masyarakat tentang pentingnya mengelola air limbah dari hasil obsevasi penulis dilapangan mengenai proses.

### **3. Output**

Output program adalah jumlah unit pelayanan yang diberikan atau jumlah orang-orang yang terlayani. Dalam penelitian ini output merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan aspek apa yang kita produksi atau dihasilkan dan siapa yang menjadi sasaran penerima manfaat, seberapa besar kelompok sasaran yang tertangani, seberapa besar kelompok yang terlibat dan sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Output atau hasil Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.6 Tanggapan Responden penelitian mengenai Output Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tercapainya tujuan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	18	32	5	55
2	Adanya manfaat yang dirasakan	22	30	3	55
	Jumlah	40	62	8	110
	Rata-rata	20	31	4	55
	Presentase	36,38 %	56,36 %	7,27 %	100%

Sumber : Data olahan 2019

Dari tabel V.6 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Output Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di

Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti) adalah 55 orang yang dijadikan sebagai responden 20 orang dengan presentase (36,36 %) menyatakan Baik, sebanyak 31 orang dengan presentase (56,36 %) menyatakan Cukup Baik dan sebanyak 4 orang dengan presentase (7,27 %) menyatakan Kurang Baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jawaban responden didominasi dalam kriteria Cukup Baik artinya Output dalam penelitian ini sudah Cukup Baik. Dilihat dari item penilaian tercapainya tujuan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi berdasarkan hasil jawaban yang mempunyai tanggapan Baik 18orang, yang menjawab Cukup Baik 32 orang, dan sementara itu sebanyak 5 orang menjawab Kurang Baik.

Sedangkan pada item penilaian adanya manfaat yang dirasakan di dominasi oleh Baik 22 orang, yang menjawab Cukup Baik 30 orang, sementara yang menjawab Kurang Baik 3 orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, Perumahan Permukiman Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti pada Hari Senin, 19 Agustus 2019 beliau mengatakan :

*Mengenai Output, tujuan kegiatan Dana Alokas Khusus Bidang Sanitasi adalah sebagai solusi penyediaan sarana parasarana sanitasi di permukiman masyarakat. Kesuksesan program juga dilihat dari keterlibatan mayarakat dalam pelaksanaan dan penggunaan dimana program berbasis masyarakat diperuntukan untuk masyarakat dan digunakan oleh masyarakat. Beliau*

*mengatakan bahwasannya kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitas Tahun 2017 di Kelurahan Selatpanjang Selatan sudah cukup tercapai dengan terbangunnya fasilitas sarana prasarana sanitasi.*

*Adapun untuk mengukur manfaat atau dampak dari kegiatan dilihat mulai dari tahap perencanaan pembangunan dimana masyarakat di Kelurahan Selatpanjang Selatan diajak kembali untuk berswadaya dan berpartisipasi dan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Baru yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk bertukar ide dan berkontribusi langsung dalam kegiatan. Dan pada tahap konstruksi/pelaksanaan pembangunan sarana prasarana masyarakat yang memiliki skil ikut berkontribusi dan mereka mendapatkan upah/gaji sehingga masyarakat mendapatkan nilai tambah penghasilan secara ekonomi masyarakat ikut terbantu. Selanjutnya pada tahap oprasional dan pemeliharaan sarana prasarana kepada Kelompok Pengguna Pemelihara masyarakat sudah bisa melakukan aktifitas Mandi,Cucii,Kakus (MCK) yang terbangun.*

*Dapat disimpulkan adanya fasilitas sarana cukup memberikan manfaat dilihat dari kemudahan masyarakat dalam mendapatkan akses air bersih dan mengelola air limbah berkurangnya penyakit yang timbul dari lingkungan, tumbuhnya kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat yang diceriminkan dari berkurangnya kebiasaan masyarkat dalam BABS.*

Penulis juga melakukan observasi dilapangan untuk melakukan pengamatan tentang output atau hasil manfaat dari adanya kegiatan pembangunan sarana prasarana sanitasi dimana tolak ukur tercapainya kegiatan Dana Alokasi

Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan dilihat dari terbangunnya sarana prasarana sanitasi di permukiman masyarakat dan fasilitas sarana IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kombinasi MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang ada cukup memberikan dampak perubahan yang signifikan di permukiman masyarakat dilihat dari kondisi sanitasi sebelum adanya kegiatan di di Jalan Ibrahim RT 04, RW 04 dan di Gang Ikhlas RT 01, RW 10 di Kelurahan Selatpanjang Selatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisa penulis lakukan berdasarkan tabel per sub indikator yang berasal dari kuisioner sebaran serta hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, Perumahan Permukiman Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti dapat ditarik kesimpulan dalam hal input adalah berada dalam presentase 56,36 % dikategorikan Cukup Baik. Adapun tujuan kegiatan untuk solusi penyediaan sarana sanitasi, memdidik kembali masyarakat untuk hidup bersih dan sehat sebagai sasaran kegiatan sanitasi lingkungan yang berbais masyarakat diperuntukkan oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat bisa dikatakan belum maksimal karena masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

#### **4. Outcome**

Outcome yaitu suatu pelaksanaan kebijakan yang berdampak nyata pada kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Ada atau tidaknya perubahan kelompok sasaran dan membandingkan antara tujuan dengan hasil yang telah dicapai.

Dalam penelitian ini Outcome program ialah respon partisipan dalam pelayanan yang diberikan mampu memberikan dampak, manfaat, opini, serta asumsi dan harapan perubahan dari sebuah kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai outcome Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.7 Tanggapan Responden penelitian mengenai Outcome Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)**

NO	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya perubahan sosial	18	20	17	55
2	Adanya perubahan kondisi lingkungan yang bersih	16	30	9	55
Jumlah		34	50	26	110
Rata-rata		17	25	13	55
Presentase		31 %	45,40 %	23,60 %	100%

Sumber : Data olahan 2019

Dari tabel V.7 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Outcome Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti) adalah 55 orang yang dijadikan sebagai responden 17 orang dengan presentase (31 %) menyatakan Baik, sebanyak 25 orang dengan presentase (45,40



%), menyatakan Cukup Baik dan sebanyak 15 orang dengan presentase (23,63 %) menyatakan Kurang Baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jawaban responden didominasi dalam kriteria Cukup Baik artinya Outcome dalam penelitian ini sudah Cukup Baik. Dilihat dari item penilaian adanya perubahan sosial berdasarkan hasil jawaban yang mempunyai tanggapan Baik 18 orang, yang menjawab Cukup Baik 20 orang, dan sementara itu sebanyak 17 orang menjawab Kurang Baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, Perumahan Permukiman Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti pada Hari Senin, 19 Agustus 2019 beliau mengatakan :

*Mengenai outcome, beliau mengatakan terbangunnya fasilitas sarana prasarana sanitasi di permukiman masyarakat di Kelurahan Selatpanjang Selatan cukup memberikan perubahan secara aspek sosial cukup berdampak dilihat dari tumbuhnya partisipasi dan rasa bergotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan mengerti dampak dari air limbah yang menumbuhkan prilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat dilihat dari berkurangnya kebiasaan sebagian masyarakat yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan.*

Selanjutnya pada item penilaian adanya perubahan kondisi lingkungan yang bersih berdasarkan hasil jawaban responden Baik 16 orang, yang menjawab Cukup Baik 30 orang, sementara yang menjawab Kurang Baik 9 orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, Perumahan Permukiman Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti pada Hari Senin, 19 Agustus 2019 beliau mengatakan :

*Perubahaan terhadap aspek lingkungan yang secara fisik dilihat nyata ialah adanya fasilitas Mandi,Cuci,Kakus (MCK) yang layak untuk masyarakat gunakan serta lokasi fasilitas yang berdekatan dengan Masjid yang memudahkan masyarakat dalam beraktifitas, lingkungan menjadi bersih dan berkurangnya pencemaran air dan tanah akibat limbah rumah tangga yang kini sudah di salurkan dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).*

Penulis juga melakukan observasi dilapangan untuk melakukan pengamatan langsung yang berlokasi di Jalan Ibrahim RT 04, RW 04 dan di Gang Ikhlas RT 01, RW 10 di Kelurahan Selatpanjang Selatan dimana penulis menemukan kondisi lingkungan yang masih kurang baik disebabkan oleh kondisi lokasi yang berdekatan dengan sungai dan sering tergenang oleh air pasang sehingga masih terlihat sampah di sekitaran permukiman masyarakat seta masih ada sebagian masyarakat yang belum menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisa penulis lakukan berdasarkan tabel per sub indikator yang berasal dari kuisisioner sebarakan serta hasil wawanacara dengan Kepala Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, Perumahan Permukiman Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti dapat ditarik kesimpulan dalam hal outcome adalah berada dalam presentase 45,40 % dikategorikan Cukup Baik.

Untuk mengetahui Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti) dapat dilihat dari data tabel tentang tanggapan responden terhadap tiap-tiap indikator penelitian diatas. Rata-rata dari tiap indikator dikelompokkan ke dalam tabel untuk mengetahui dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan bagi masyarakat di Kelurahan Selatpanjang Selatan.

Untuk lebih jelasnya, penulis paparkan pada rekapitulasi hasil tanggapan responden sebagai berikut :

**Tabel V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Input	26	20	9	55
2	Proses	16	32	7	55
3	Output	20	31	4	55
4	Oucome	17	25	13	55
	Jumlah	79	108	33	220
	Rata-rata	20	27	8	55
	Presentase	36,36 %	49,09 %	14,45 %	100%

Sumber : Data olahan 2019

Berdasarkan rekapitulasi data diatas tentang tanggapan responden yang diperoleh, dapat dianalisa yang telah dilakukan penulis dari tabel per sub indikator yang berasal dari hasil kuisioner sebaran serta hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, Perumahan Permukiman Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti dapat ditarik kesimpulan

bahwa Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat di Kelurahan Selatpanjang Selatan adalah 49,09 %. Jika disesuaikan dengan teknik pengukuran dikategorikan Cukup Baik. Dan dilihat dari hasil Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti) menurut penulis terhadap semua hasil penelitian berdasarkan indikator dan observasi langsung di lapangan adalah Cukup Berdampak. Hal ini dapat dilihat Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat sebagai program yang berprioritas skala nasional yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan memperbaiki sanitasi dasar untuk masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan menjadi salah satu kesuksesan kegiatan sanitasi, setelah terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana tentunya diharapkan memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat penerima manfaat. Untuk melihat sejauh mana dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang berlokasi di Jalan Ibrahim RT 04, RW 04 dan di Gang Ikhlas RT 01, RW 10 Kelurahan Selatpanjang Selatan. peneliti mencoba untuk memaparkan kondisi sanitasi masyarakat setelah pelaksanaan terbangunnya sarana prasarana sanitasi di lingkungan masyarakat antara lain:

1. Dampak pada aspek sosial

- a. Dalam proses pelaksanaan kegiatan tumbuhnya kemandirian dan kepedulian masyarakat yang dilihat dari partisipasi dalam membangun sarana prasarana sanitasi secara swakelola.
  - b. Adanya wadah untuk masyarakat saling bermusyawarah mengenai dalam memecahkan masalah lingkungan.
  - c. Berkurangnya kebiasaan masyarakat dalam buang air besar sembarangan dan membuang air limbah yang dihasilkan dari rumah tangga dan menjadikan masyarakat lebih produktif dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.
2. Dampak pada aspek lingkungan
- a. Bagi masyarakat sasaran yang sebelumnya hanya memiliki jamban cemplung kini sudah memiliki fasilitas jamban kloset yang layak untuk akses buang air kecil dan buang air besar.
  - b. Lingkungan menjadi bersih dan nyaman tidak ada lagi pencemaran air dan tanah, karena limbah rumah tangga kini sudah disalurkan ke sarana IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)
  - c. Adanya fasilitas sarana Mandi,Cuci,Kakus (MCK) memudahkan masyarakat dalam mengakses air bersih, akses mandi, cucu dan kakus.
  - d. Lokasi fasilitas MCK (Mandi,Cuci,Kakus) yang berdekatan dengan Musholla Al-Muthmainnah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses air bersih untuk berwudhu.
  - e. Adanya lingkungan yang bersih membuat berkurangnya penyakit akibat sanitasi yang buruk.



## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat merupakan program yang bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang kondisi sanitasi dan solusi dalam penyediaan sarana prasarana sanitasi untuk

masyarakat. Adapun penelitian ini untuk melihat dampak Dari hasil Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti) berada pada kategori Cukup Baik. Adapun dampak kegiatan terhadap sosial dan lingkungan masyarakat di Kelurahan Selatpanjang Selatan adalah : Adanya perubahan kondisi lingkungan dipemukiman masyarakat dengan terbangunnya fasilitas sarana prasarana sanitasi yang memudahkan akses MCK (Mandi, Cuci, Kakus) masyarakat secara layak. Tumbunya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Berkurangnya penyakit yang timbul dari lingkungan akibat pencemaran air limbah.

Selanjutnya dalam proses menggunakan sarana prasarana sanitasi, masyarakat cukup berpartisipasi namun masih ada sebagian masyarakat yang belum paham akan pentingnya sanitasi dalam mengelola air limbah yang menyebabkan sebagian masyarakat belum mau menggunakan sarana prasarana sanitasi yang terbangun dan lebih memilih melakukan aktifitas mandi, cuci, kakus di fasilitas mereka secara pribadi.

#### **B. Saran**

1. Untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan kontribusi dengan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan terkait mensoialisasikan tentang pentingnya sanitasi lingkungan yang berkelanjutan untuk masyarakat penerima pemanfaat program.
2. Untuk masyarakat diharapkan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat agar mendorong program sanitasi lingkungan yang di buat oleh

pemerintah dengan ikut serta menggunakan serta menjaga fasilitas sarana yang sudah terbangun.

3. Diharapkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengumpulkan uang iuran untuk perawatan sarana prasarana dan biaya penerangan agar sarana dan digunakan dan terawat.

#### DAFTAR PUSTAKAAN

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- A.G Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- A.G Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Ardianto dan Soemirat. 2004. *Dasar-Dasar Public Relations*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta :Gajah mada universitas Press.
- Handyaningrat, Soewarno, 1988. *Pengantar Studi Ilmu Adminstrasi dan Manajemen*, CV. Hajimas Agung, Jakarta.
- Hosio, JE. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Laksbang. Yogyakarta.
- Husnaini, Usman. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media



- Iskandar. 2008 *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Arca
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta
- Kusnoputranto, Haryanto, 1986. *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lobolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mardikanto dan Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ndraha, taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, taliziduhu. 2010. *Metode Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, taliziduhu. 2011. *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, taliziduhu. 2011. *Kybernologi 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho D, Rianti. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta :PT. Elex Media Indonesia Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Penerbit Grasindo
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy Pengantar Teori dan Analisis Kebijaka*, Jakarta : kencana.
- Riduwan, 2009. *Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*. Bandung: Afabeta
- Rianse, Usman. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonmi Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.
- Slamet, Juli Soemirat. 2004. *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: UGM Press.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfaberta
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Suryadiningrat, Bayu 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Filsafat Pemerintahan*. Jakarta. Perca.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *System Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Wibawa, Samodra Abdul (1994), *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Wibawa, Samodra 2011, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Zulkifli, DKK. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP ) Hasil Penelitian (SKRIPSI), dan Kertas Kerja Mahasiswa (KKM) Edisi Revisi 2013*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.

#### **Dokumentasi :**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Pengembangan Peumahan Lingkungan Permukiman. Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrstruktur Sub Bidang Sanitasi Tahun 21017.

**Jurnal :**

Rizky Pratama Putra, Soesilo Zauhar, Abdul Said. Dampak Program Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Masyarakat (Studi pada Kelompok Swadya Masyarakat Tirto Putra Utomo Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, Hal. 175-183

Adi, I. K & Rahdriawan, M. (2016). Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PSBM) di Kelurahan Mangunharjo, Semarang. *Pengembangan Kota*. Vol 4 (2): 152-159 DOI : 10.14710/jpk.4.2.151-159

Moh. Fajar Nugraha. (2016). Dampak Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumjang. *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol 3. No 2